

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia merupakan hambatan yang signifikan untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan<sup>1</sup>. Terlepas dari kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang sangat besar, ketimpangan pendapatan sering kali menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar dan kualitas hidup. Ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa menjadi isu yang penting dan dapat mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di Indonesia. Pulau Jawa menjadi pulau terpadat dan menjadi pusat perekonomian negara yang menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB).

Ketimpangan distribusi pendapatan biasanya lebih besar dialami oleh negara-negara yang berkembang, sedangkan negara maju yang lebih tinggi tingkat distribusinya justru tingkat ketimpangan distribusinya rendah. Menurut Todaro<sup>2</sup>, negara-negara maju secara keseluruhan memperhatikan pembagian pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan negara-negara dengan negara-negara dunia ketiga yaitu negara-negara berkembang. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang.

Konsep pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua entitas konsep ekonomi yang saling berkaitan satu sama lain. Namun pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan kekayaan antara distrik yang lebih maju dan kurang berkembang,

---

<sup>1</sup> Axel J. Lala, Amran T. Naukoko, Hanly F. Dj. Siwu, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Studi pada Kota-Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 23 (1), 2023.

<sup>2</sup> Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi Kesembilan*, (Jakarta: Erlangga, 2006).

juga antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang berisi mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan teori *fiscal equalization* dengan memberikan alokasi yang lebih besar kepada daerah-daerah yang kurang mampu dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah<sup>3</sup>.

Berdasarkan teori dari Widjaja<sup>4</sup>, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan otonomi daerah terutama pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, pemerintah pusat melakukan kebijakan melalui dana perimbangan yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN. Dana perimbangan tersebut diantaranya terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)<sup>5</sup>.

Transfer fiskal di Indonesia terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa yang merupakan instrument desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik daerah. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk kebutuhan dasar daerah, Dana Alokasi Khusus ditujukan bagi program prioritas nasional, sedangkan Dana Desa difokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ketiga dana transfer tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-

---

<sup>3</sup> Womsiter Sinaga, *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Darma Agung, 31 (1), 2023.

<sup>4</sup> H. A. W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Depok: PT Rajawali Pers, 2019).

<sup>5</sup> Salsabila P. Putri, Dyah Ratnawati, *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SILPA Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 6 (2), 2023.

Undang tersebut mulai diterapkan pasca-reformasi tahun 1998 seiring perluasan otonomi daerah<sup>6</sup>.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang yaitu terkait pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga pemerintah pusat mengupayakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan pada daerah-daerah yang tertinggal dengan mengalokasikan dana desa<sup>7</sup>. Dana desa merupakan alokasi anggaran yang ditujukan untuk mendukung peningkatan, kesejahteraan masyarakat, dan lainnya sebagai komitmen pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun<sup>8</sup>.

Pernyataan tersebut didukung oleh teori stewardship yang menyatakan bahwa dana desa membantu menganalisis bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan<sup>9</sup>. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu dasar yang menyebutkan bahwa keuangan pada tingkat daerah dan diatur oleh daerah itu sendiri sesuai dengan permasalahan daerah masing-masing.

Provinsi yang terletak di pulau Jawa terbagi menjadi enam provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur yang tidak bisa terlepas dari permasalahan ketimpangan ekonomi. Perbedaan karakter antar provinsi yang diduga memiliki pengaruh dan citra yang cukup

---

<sup>6</sup> Diakses melalui [UNDANG](#) pada Selasa, 3 Juni 2025 pukul 21:15

<sup>7</sup> Benardin, Merri Anitasari, *Pengaruh Dana Desa dan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Pulau Jawa dan Sumatera*, CONVERGENCE: The Journal of Economic Development, 5 (2), 2023.

<sup>8</sup> Annisa R. Ardiyani, Evi R. Utami, Hilma T. Amanati, Abdurrahman M. Yusuf, *Studi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo*. JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4 (2), 2021.

<sup>9</sup> Ica Maulidna Fatimah Deviani, *Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat Desa Melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening*, JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 6 (1), 2024.

kuat pada pola pembangunan ekonomi wilayahnya. Sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang wajar apabila pembangunan ekonominya belum merata. Ketidakmerataan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan untuk tumbuh yang berakibat pada beberapa wilayah mampu tumbuh dan berkembang dengan cepat, sementara daerah yang lain tumbuh dengan lambat.

Beberapa unsur yang ditemukan dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan perekonomian yang bisa menciptakan kondisi perekonomian yang tidak merata. Ketidakmerataan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan untuk tumbuh yang berakibat pada beberapa wilayah mampu tumbuh dan berkembang dengan cepat, sementara daerah yang lain tumbuh dengan lambat. Oleh karena itu diterapkanlah desentralisasi fiskal yang merupakan penerapan kebijakan pada tingkat daerah mengenai pengaturan keuangan, yang diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.<sup>10</sup>

Penelitian ini didasarkan pada teori-teori transfer fiskal berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan melalui pendekatan teoritis yang beragam. Dana Alokasi Umum mencerminkan teori redistribusi fiskal Keynes, yang menekankan intervensi negara dalam pemerataan pendapatan<sup>11</sup>. Dana Alokasi Khusus sesuai dengan teori ketimpangan struktural Prebisch, yang menyoroti perlunya alokasi selektif untuk mengatasi ketertinggalan wilayah<sup>12</sup>. Dana Desa sejalan dengan teori

---

<sup>10</sup> Latifah, Diah Setyorini Gunawan, Agus Arifin, *Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Desa, dan Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Kawasan Papua*, JURNAL EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 12 (1), 2024.

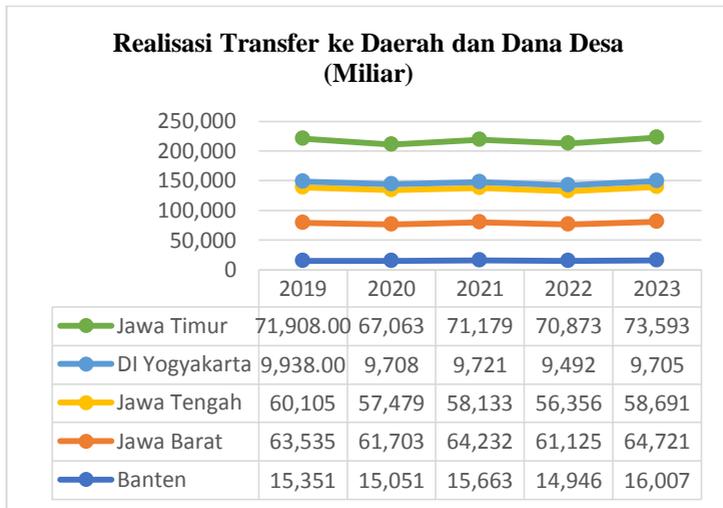
<sup>11</sup> Ali Tafriji Biswan, *Keuangan Publik: Teori Dan Implementasi Pengambilan Keputusan Publik*, ed. Primandita Fitriandi, Cetakan Pertama (Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022).

<sup>12</sup> Muhammad Hasan and Muhammad Aziz, *PEMBANGUNAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: STRATEGI PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI LOKAL*, Kedua (CV. NUR LINA & Pustaka

ekonomi regional Issard, yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis lokal. Sementara itu, teori U terbalik Kuznets menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi awal cenderung meningkatkan ketimpangan, namun menurun pada tahap lanjutan pembangunan, sehingga transfer fiskal menjadi instrumen penting untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif.

Dalam penelitian ini menggunakan seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa kecuali DKI Jakarta karena ketidaktersediaannya data pada data yang sesuai dengan website resmi dari [djk.kemenkeu](http://djk.kemenkeu) serta Badan Pusat Statistik. Berikut merupakan grafik realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada lima Provinsi di Pulau Jawa yang diperoleh dari website [djk.kemenkeu](http://djk.kemenkeu):

**Grafik 1.1**



*Sumber: [djk.kemenkeu](http://djk.kemenkeu)*

---

Taman Ilmu, 2018), [http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku\\_pembangunan\\_ekonomi\\_contoh\\_fix.pdf](http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku_pembangunan_ekonomi_contoh_fix.pdf).

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diperoleh daerah cukup bervariasi, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Transfer ini berfungsi sebagai instrumen pendukung pemerataan pembangunan dan menutupi kekurangan pendanaan daerah-daerah yang kurang mampu. Selain itu transfer ini juga berfungsi untuk mendanai berbagai proyek dan program untuk meningkatkan infrastruktur yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah<sup>13</sup>.

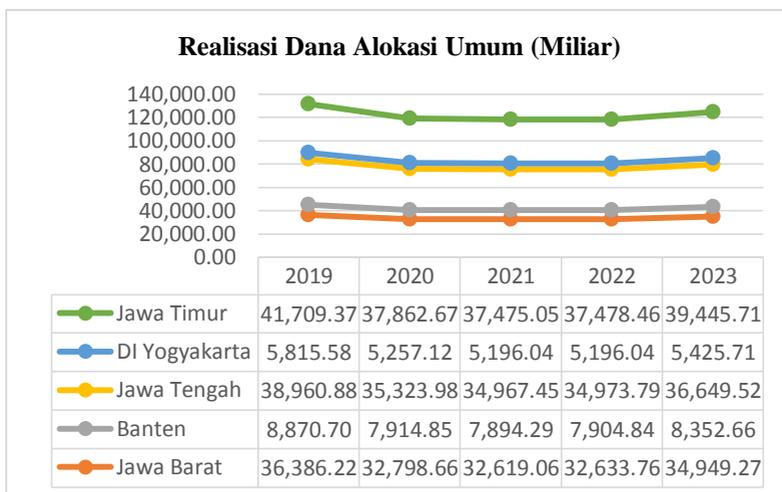
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam menjalankan desentralisasi fiskal yang merupakan dana transfer oleh pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk mencegah ketimpangan antar daerah, menutupi celah fiskal daerah serta membiayai kebutuhan daerah sesuai dengan prioritas nasional<sup>14</sup>. Dalam penelitian ini menggunakan tiga alokasi dana TKDD yakni, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Desa. Berikut merupakan grafik realisasi dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada lima Provinsi di Pulau Jawa yang diperoleh dari website djpk.kemenkeu:

---

<sup>13</sup> Hasannudin N Putra, Lavenia I Pratiwi, Puteri S Al-Sakinah, M. Dedy E. T. Safari, *Pengaruh PAD, TKDD, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jombang*, EABMIJ: Economic and Business Management International Journal, 6 (2), 2024.

<sup>14</sup> Samuel Fery Purba, Bonatoni Maruli Timothy Vincent Simandjorang, *Pengaruh Dana Perimbangan dalam Mengurangi Pendapatan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara*, *INDONESIAN TREASURY REVIEW: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9 (2), 2024.

**Grafik 1.2**



**Sumber: *djpk.kemenkeu***

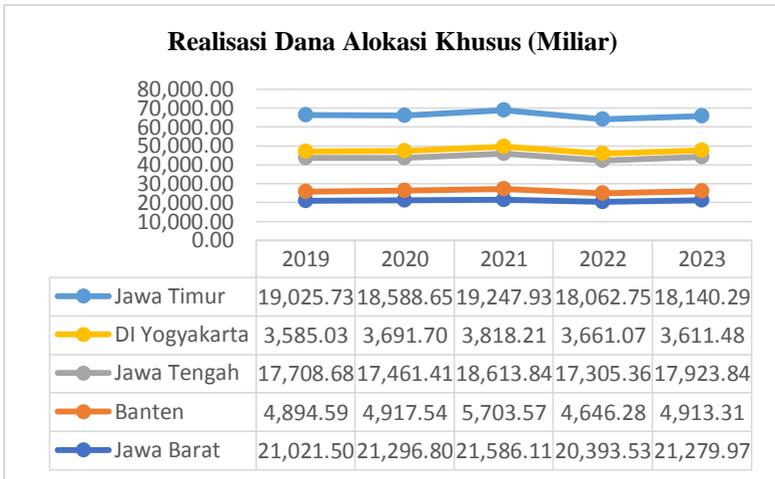
Dana Alokasi umum merupakan dana APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang jumlah transfernya dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing<sup>15</sup>. Dapat dilihat dari grafik 1.2, jumlah transfer DAU yang diberikan pada enam Provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2019-2023 cenderung tinggi terutama pada Provinsi Jawa Timur. Tahun 2019, Provinsi Jawa Timur menerima paling banyak transfer DAU yaitu sebesar 41.709,37 miliar.

Berikut merupakan grafik realisasi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada lima Provinsi di Pulau Jawa yang diperoleh dari website *djpk.kemenkeu*:

---

<sup>15</sup> Agus Sunarya Sulaeman, Vivin Silvia, *Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah dan Belanja Modal, Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*, JAA: Jurnal Aplikasi Akuntansi, 4 (1), 2019.

**Grafik 1.3**



*Sumber: djpk.kemenkeu*

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan atau urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004<sup>16</sup>. Berdasarkan data pada grafik 1.3 menunjukkan bahwa TKDD berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagian besar dialokasikan untuk Provinsi Jawa Timur, hal ini disebabkan oleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah dalam menyumbang pendapatan daerah<sup>17</sup>.

Pada grafik 1.3 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2021 realisasi dari DAK oleh beberapa provinsi mengalami peningkatan, seperti Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 19.247,93 miliar, Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 3.818,21 miliar dan

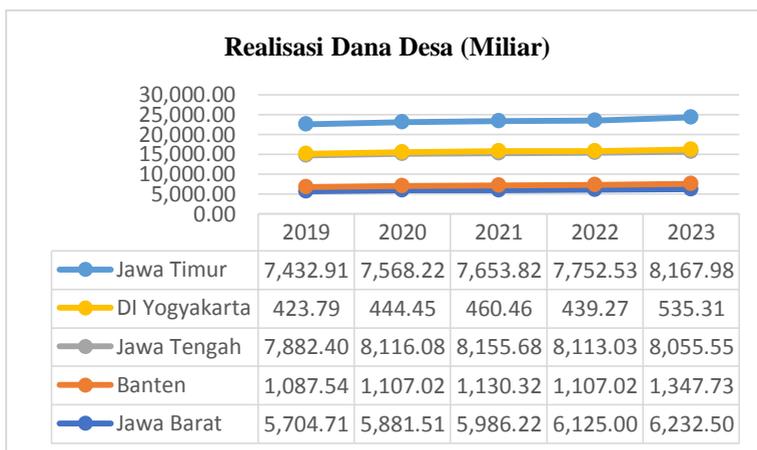
<sup>16</sup> Anika Syahdila Putri, Muchtolifah, Sishadiyati, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal*, Jambura Economic Education Journal, 3 (2) 2021.

<sup>17</sup> Anggi Wahyu Puspita, Gideon Setyo Budiwitjaksono, *Determinan Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur*, JUMIA: Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 1 (4), 2023.

Provinsi Jawa Tengah yakni 18.613,84 miliar. Beberapa daerah menerima TKDD yang cukup tinggi karena dinilai tidak memiliki kemandirian yang baik ketika mendanai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa bantuan dana transfer dari pusat<sup>18</sup>.

Berikut merupakan grafik realisasi dari dana desa pada lima Provinsi di Pulau Jawa yang diperoleh dari website djpk.kemenkeu:

**Grafik 1.4**



**Sumber: djpk.kemenkeu**

Berdasarkan grafik 1.4 menunjukkan bahwa dana desa yang diterima oleh enam provinsi tersebut meningkat setiap tahunnya, salah satunya adalah realisasi dari Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun 2019, Provinsi Jawa Tengah merealisasikan dana desa sejumlah 7.882,40 miliar. Kemudian pada tahun 2020, jumlah tersebut meningkat hingga 8.116,08 miliar, namun pada tahun 2021 jumlah tersebut juga mengalami peningkatan hingga menjadi 8.155,68 miliar. Jumlah realisasi dari dana desa pada

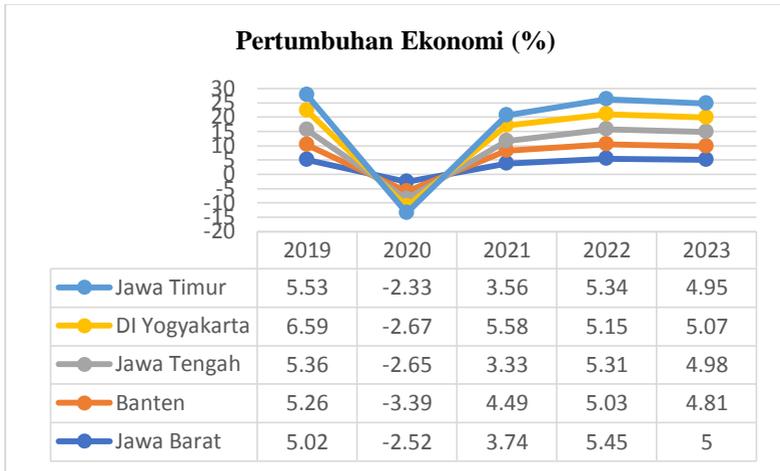
---

<sup>18</sup> Wulan Riyadi, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*, J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi, 3 (1), 2022.

tahun 2022 juga mengalami penurunan hingga 8.113,03 miliar dan menurun pada tahun 2023 yang jumlahnya menjadi 8.055,55 miliar.

Berikut merupakan grafik pertumbuhan ekonomi pada lima Provinsi di Pulau Jawa yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Nasional:

**Grafik 1.5**



**Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional**

Berdasarkan grafik 1.5 menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada lima tahun terakhir. Dalam grafik tersebut ditunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada lima provinsi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten berada pada -3,39%. Kemudian Provinsi Jawa Barat juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, yaitu -2,52%. Pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2020 tersebut berhasil dilalui oleh Provinsi Jawa Timur yaitu -2,33%. Dibandingkan dengan provinsi lainnya, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Jawa Barat berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional. Menurunnya pertumbuhan

ekonomi pada tahun 2020 merupakan salah satu dampak dari adanya pandemi COVID-19<sup>19</sup>.

Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi<sup>20</sup>. Menurut Kuznets, terdapat dampak positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan dalam jangka pendek, namun dampak tersebut menjadi negatif apabila dalam jangka panjang<sup>21</sup>. Ketika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka pendapatan juga mengalami peningkatan secara keseluruhan. Namun jika manfaat dari pertumbuhan tersebut tidak di distribusikan secara merata, maka ketimpangan pendapatan juga akan semakin meningkat. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Aisyah<sup>22</sup>, serta penelitian Alamanda<sup>23</sup> yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat mengindikasikan bahwa DAU, DAK dan dana desa bisa mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi<sup>24</sup>. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

---

<sup>19</sup> Irfan Sofi, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa*, *INDONESIAN TREASURY REVIEW: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6 (3), 2021.

<sup>20</sup> Putri Indah Lestari, Bernadette Robiani, Sukanto, *Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah dan Ekonomi Bisnis*, 11 (2), 2023.

<sup>21</sup> Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi (12<sup>th</sup> Edition)*, United Kingdom, Harlow: Essex Person Education Limited.

<sup>22</sup> Erni Sri Wijayanti, Siti Aisyah, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Asing, Inflasi dan Trade Openness Terhadap Ketimpangan di Indonesia Tahun 2000-2020*, *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 6 (2), 2022.

<sup>23</sup> Alamanda, *The Effect of Economic Growth on Income Inequality: Panel Data Analysis from Fifty Countries*, *INFO ARTHA*, 5 (1), 2021.

<sup>24</sup> Jolianis, *Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening*, *ECONOMICA: Journal of Economic an Economic Education*, 4 (2), 2016.

## **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening”.**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika ketimpangan pendapatan antara provinsi di Pulau Jawa, yang tetap menjadi tantangan meskipun beberapa wilayah memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai instrument fiskal, seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa untuk mendorong pemerataan. Namun, efektivitas ketiga instrument tersebut dalam menurunkan ketimpangan belum sepenuhnya teruji secara empiris, terutama jika mempertimbangkan peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana ketiga dana tersebut memengaruhi ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Jawa pada periode 2015-2024, serta untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan fiskal dan pembangunan wilayah yang lebih efektif dan merata.

### **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

#### **1) Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang, maka identifikasi masalah diperlukan mengenai ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengetahui terkait variabel-variabel yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ketimpangan Pendapatan (Y), merupakan perbedaan kondisi perekonomian masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah, maka ketidak seimbangan pembangunan akan terjadi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan.

- b. Dana Alokasi Umum (X1), adalah dana APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah DAU dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan daerah tujuan dan belum tentu jumlah DAU dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan
- c. Dana Alokasi Khusus (X2), merupakan dana APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu atau khusus. Jumlah transfer DAK yang diberikan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan daerah yang dituju, serta belum tentu jumlah DAK tersebut mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan.
- d. Dana Desa (X3), dana ini diperuntukkan bagi daerah yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan. Namun, dana desa juga belum tentu berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan.
- e. Pertumbuhan Ekonomi (Z), merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara atau suatu daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi belum tentu mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan.

## 2) Batasan Masalah

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka dalam menentukan batasan masalah berdasarkan pada latar belakang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Objek Penelitian yang digunakan adalah pemerintah lima Provinsi di Pulau Jawa.

- b. Faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu dana perimbangan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana desa dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diperoleh untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap ketimpangan pendapatan daerah pemerintah Provinsi di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap ketimpangan pendapatan daerah pemerintah Provinsi di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap ketimpangan pendapatan daerah pemerintah Provinsi di Pulau Jawa?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan daerah pemerintah Provinsi di Pulau Jawa?
5. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap ketimpangan pendapatan daerah pemerintah Provinsi di Pulau Jawa melalui pertumbuhan ekonomi?
6. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap ketimpangan pendapatan daerah pemerintah Provinsi di Pulau Jawa melalui pertumbuhan ekonomi?
7. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap ketimpangan pendapatan daerah pemerintah Provinsi di Pulau Jawa melalui pertumbuhan ekonomi?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap ketimpangan pendapatan daerah pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.

- 2) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap ketimpangan pendapatan daerah pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.
- 3) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh dana desa terhadap ketimpangan pendapatan daerah pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.
- 4) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan daerah pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.
- 5) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap ketimpangan pendapatan daerah pemerintah Provinsi di Pulau Jawa melalui pertumbuhan ekonomi.
- 6) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap ketimpangan pendapatan daerah pemerintah Provinsi di Pulau Jawa melalui pertumbuhan ekonomi.
- 7) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh dana desa terhadap ketimpangan pendapatan daerah pemerintah Provinsi di Pulau Jawa melalui pertumbuhan ekonomi.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan makna bagi instansi maupun bagi pihak yang terlibat dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan secara teoritis**

Dalam penelitian ini menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai teori-teori dan literatur mengenai efektivitas transfer fiskal daerah dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, khususnya dengan mempertimbangkan peran variabel intervening berupa pertumbuhan ekonomi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait hubungan antara kebijakan fiskal dan distribusi

pendapatan dalam konteks ekonomi regional. Selain itu, penelitian ini turut mendukung pengembangan teori ekonomi pembangunan yang menekankan pentingnya sinergi antara instrument fiskal dan dinamika pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan pemerataan.

## **2. Kegunaan secara praktis**

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan makna serta faedah untuk:

- a) Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai tambahan dan pengetahuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas ilmu, khususnya pada bidang ilmu ekonomi pembangunan agar dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan pada semua pihak.
- b) Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu tambahan pembendaharaan perpustakaan pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut. Khususnya mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana desa terhadap ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.
- c) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah sejenis yang dilakukan oleh peneliti berikutnya dengan mengembangkan variabel lain dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

## **F. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah terdiri dari dua, diantaranya adalah penegasan konseptual dan penegasan operasional. Istilah yang beragam ditegaskan dalam bagian ini mengandung interpretasi dan ditegaskan mengarah pada masalah penelitian dan diakhiri

dengan istilah secara keseluruhan pengertian judul yang dimaksud oleh peneliti.

#### **a. Penegasan Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian yang berjudul “**Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah Pemerintaah Provinsi di Pulau Jawa dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening**”, maka peneliti memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

##### **1) Ketimpangan Pendapatan**

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan kemakmuran kondisi perekonomian masyarakat dalam suatu wilayah, karena adanya perbedaan pendapatan<sup>25</sup>.

##### **2) Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia<sup>26</sup>.

##### **3) Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu atau khusus<sup>27</sup>.

##### **4) Dana Desa**

Dana desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai keuangan desa<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi (12<sup>th</sup> Edition)*, United Kingdom, Harlow: Essex Pearson Education Limited, 2015.

<sup>26</sup> Siktania Maria Dilliana, Henrikus Herdi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Purbalingga: EUREKA, 2022).

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

## 5) **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output per kapita (berupa barang dan jasa) secara berkelanjutan yang menggunakan kapasitas produksi yang ada dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan belum digunakan secara optimal<sup>29</sup>.

### **b. Penegasan Operasional**

Penegasan operasional merupakan definisi dari variabel operasional, secara praktik, nyata dalam lingkup objek penelitian. Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka penegasan operasionalnya adalah sebagai berikut:

#### **1) Ketimpangan Pendapatan**

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan kemakmuran kondisi perekonomian masyarakat dalam suatu wilayah, karena adanya perbedaan pendapatan. Ketimpangan Pendapatan dapat diukur menggunakan koefisien gini atau gini rasio yang didapatkan dari jumlah kumulatif presentase pendapatan pada kelas i dan jumlah kumulatif presentase pendapatan pada kelas sebelumnya.

#### **2) Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diperoleh dari jumlah Alokasi Dasar dan Celah Fiskal.

#### **3) Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk daerah

---

<sup>28</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020).

<sup>29</sup> Mohammad Saleh, Sonny Sumarsono, *Pengantar Ekonomi Makro*. (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2015).

tertentu atau khusus. Jumlah Dana Alokasi Khusus diperoleh melalui penerimaan APBD dikurangi total pengeluaran untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil.

#### **4) Dana Desa**

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi daerah yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan. Dana Desa diperoleh dari jumlah alokasi dasar dan alokasi formula.

#### **5) Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh dari jumlah PDRB periode tertentu dikurangi PDRB periode selanjutnya -1 dibagi PDRB periode tahun berikutnya -1 dibagi dengan PDRB periode tersebut -1 dikalikan dengan 100%.

### **G. Sistematika Penulisan Tesis**

#### **1. Bagian Awal Tesis**

Bagian awal tesis terdiri dari sampul depan, sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman persetujuan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar grafik, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran dan halaman abstrak.

#### **2. Bagian Utama atau Inti Tesis**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah secara konseptual dan operasional, serta sistematika penulisan Tesis.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas mengenai kajian dan teori terkait variabel Ketimpangan Pendapatan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi. Pada bab ini juga disertai dengan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual serta dilengkapi dengan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode serta tahapan dalam penelitian yang terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrument penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan secara detail mengenai gambaran objek penelitian, penguraian data setiap variabel, hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap variabel-variabel penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengujian hipotesis.

## **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai jawaban atas permasalahan penelitian dan pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada BAB VI berisi mengenai dua hal pokok, yaitu kesimpulan dan saran. Serta pada bagian akhir terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.